

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA WADUK DARMA OLEH PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

Gina Gonyatuddiniyah, Heriyani Agustina, Moh. Taufik Hidayat
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat
Email haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v3i2.10947

Diterima: Pebruari 2019; Direvisi: Maret 2019; Dipublikasikan: April 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata melalui empat aspek yang diusulkan oleh Edwards, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi berbagai elemen penting terkait kebijakan pariwisata. Para informan dalam studi ini terdiri dari kepala bagian PSDM dan Legal, staf pengelolaan pariwisata, masyarakat lokal, pengunjung, dan petugas pengelolaan wisata. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata telah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah tantangan. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa model kebijakan pariwisata yang paling ideal untuk diterapkan adalah yang berbasis masyarakat. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah minimnya sinergi dalam komunikasi antar pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, di sisi lain, tingginya komitmen dari pemimpin politik daerah dan dukungan yang solid terhadap sumber daya menjadi faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pariwisata, Daya Tarik Wisata

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu bagian dari pembangunan yang sedang didorong oleh pemerintah saat ini. Ini disebabkan karena pariwisata memiliki peranan yang sangat krusial dalam kemajuan Indonesia, terutama sebagai salah satu sumber pendapatan negara, serta sebagai pilar utama pembangunan nasional yang dapat mendukung ekonomi negara saat krisis global terjadi. Pariwisata di Indonesia juga berperan penting dalam ekonomi, selain berfungsi sebagai

penggerak perekonomian, juga menawarkan cara menarik untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009, dibentuklah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja. PDAU mulai beroperasi pada 22 Maret 2010, yang diawali dengan pelantikan Dewan Direksi oleh Bupati Kuningan. Sejak itu, PDAU secara bertahap mengambil alih pengelolaan beberapa tempat wisata yang sebelumnya diurus oleh

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan serta pihak ketiga. Selaras dengan visi Kabupaten Kuningan yang menginginkan "Kuningan Menjadi Kota Pariwisata dan Konservasi", dan untuk menghadirkan pengelolaan tempat wisata yang lebih profesional, maka berdasarkan SK Bupati Nomor 180/KPTS. 251-Huk/2010, Bupati Kuningan menetapkan PDAU untuk mengelola dan mengembangkan sembilan lokasi wisata, termasuk objek wisata Waduk Darma. PDAU memiliki komitmen untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Kabupaten Kuningan dengan mengedepankan Spirit C4 yaitu: Clean, Committed, Capable, dan Competitive. PDAU bertekad untuk mengembangkan beragam potensi usaha di Kabupaten Kuningan dan di Indonesia agar dapat diproses menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga dapat menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan. Sektor usaha yang akan di jalankan oleh PDAU sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kuningan meliputi Agribisnis, Pariwisata, Energi, Kesehatan, Perdagangan, dan berbagai jasa lainnya.

Salah satu daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Kuningan dan dikelola oleh PDAU adalah Waduk Darma. Waduk adalah ekosistem yang memberikan banyak manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia dan lingkungan; secara umum, fungsi waduk adalah sebagai sumber air untuk irigasi. Begitu juga dengan Waduk Darma yang menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Kuningan dengan luas 425 ha, yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan perikanan, penyediaan air irigasi, air baku PDAM, dan sektor pariwisata.

REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Waduk Darma belum berjalan secara maksimal, yang tercermin dari beberapa aspek berikut:

1. Belum efektifnya komunikasi yang berkaitan dengan sosialisasi dan promosi tentang Objek Wisata Waduk Darma.
2. Pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha masih kurang optimal.
3. Fasilitas pendukung bagi pengunjung di Objek Wisata Waduk Darma belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang masih belum maksimal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan untuk memudahkan pembahasan yang akan dilakukan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor yang menghalangi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan?
3. Strategi apa yang telah diterapkan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk

Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
3. Untuk merumuskan strategi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi dan perusahaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan Tempat Wisata Waduk Darma.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis baik secara praktis maupun teoritis mengenai implementasi kebijakan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya referensi di bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama tentang implementasi kebijakan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya pada kajian yang serupa.

Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

kebijakan, yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau pihak swasta. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah proses yang bersifat dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan itu.

Menurut Edwards, studi mengenai pelaksanaan kebijakan sangatlah penting dalam konteks administrasi publik dan kebijakan publik. Model pelaksanaan kebijakan yang disampaikan oleh Edward III memiliki sudut pandang dari atas ke bawah. Dalam model ini, Edward III mengidentifikasi empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sumber Daya Manusia
 - a. Anggaran
 - b. Fasilitas
 - c. Informasi dan Kewenangan
4. Disposisi
5. Struktur Birokrasi

Definisi Konsep Penelitian

Untuk mencapai pemahaman yang seragam dalam penelitian, diberikan definisi sebagai berikut:

1. Implementasi
Ripley dan Franklin (2007:145) mengemukakan bahwa implementasi adalah segala hal yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan kekuasaan atas program, kebijakan, manfaat, atau hasil yang nyata. Sementara itu, Kebijakan
2. Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan pariwisata adalah serangkaian upaya untuk menciptakan keselarasan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya pariwisata,

dalam hal ini Objek Wisata Waduk Darma, serta mengintegrasikan semua aspek yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kelangsungan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi dari konsep penelitian dilakukan dengan menjelaskan berbagai dimensi sesuai teori yang digunakan, selanjutnya dijabarkan menjadi parameter-parameter. Untuk mempermudah analisis data, maka konsep penelitian dalam penelitian kualitatif, yaitu implementasi, dioperasionalkan atau dijelaskan menjadi parameter seperti dalam tabel berikut:

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:8) adalah teknik analisis yang digunakan untuk meneliti situasi yang alami, yang berbeda dengan eksperimen di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang mencakup gabungan analisis dan bersifat induktif, serta hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada arti daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yang memiliki makna. Makna adalah esensi dari data yang nyata, merupakan nilai sebenarnya yang berada di balik data yang terlihat. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi.

Metode yang penulis pilih adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan masalah-masalah nyata yang muncul saat penelitian berlangsung. Penulis REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

menggunakan metode ini karena penelitian yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel, tetapi lebih untuk menggali, menemukan, menjelaskan, dan memaparkan tentang Implementasi Kebijakan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis terletak di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Penulis memilih lokasi Objek Wisata Waduk Darma karena terdapat:

1. Masalah antara peraturan dan pelaksanaan yang tidak sesuai.
2. Akses untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian cukup mudah.
3. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis dalam penyusunan laporan.

Durasi penelitian yang dilakukan penulis berlangsung sekitar tujuh bulan, dimulai dari bulan Maret 2020 hingga September 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Implementasi dianggap secara umum sebagai pelaksanaan undang-undang di mana berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersamaan untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mencapai sasaran program. Merilee S. Grindle (1980:149) mengemukakan pandangannya tentang implementasi dengan menyatakan bahwa: Secara umum, tugas implementasi adalah membangun sebuah hubungan yang mempermudah realisasi tujuan kebijakan

sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, implementasi meliputi pembentukan "sistem penyampaian kebijakan" di mana alat-alat tertentu dirancang dan dioperasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pernyataan kebijakan publik yang luas mengenai tujuan, sasaran, dan alat diubah menjadi program-program tindakan yang ditujukan untuk meraih tujuan yang dinyatakan. Dalam konteks ini, berbagai program dapat dikembangkan untuk memenuhi tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan tersebut dapat dirinci menjadi proyek-proyek spesifik untuk dikelola. Tujuan dari program tindakan dan proyek-proyek individu adalah menciptakan perubahan dalam lingkungan kebijakan, di mana perubahan ini dapat dipahami sebagai hasil dari suatu program.

Pengertian Kebijakan

Pada umumnya, istilah "kebijakan" atau "policy" merujuk pada perilaku individu (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak. Amara Raksataya dalam buku Sri Suwitri (Konsep Dasar Kebijakan Publik) mendefinisikan kebijakan sebagai: suatu cara dan strategi yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, sebuah kebijakan terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. Penentuan tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut;
3. Penyediaan berbagai sumber daya yang diperlukan agar taktik atau strategi dapat diimplementasikan secara efektif.

Meskipun banyak ahli memberikan definisi tentang kebijakan, hal ini tidak menyulitkan REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

kita untuk menarik kesimpulan tentang pengertian kebijakan. Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah yang mendukung kepentingan masyarakat;
2. Serangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini adalah strategi yang disusun untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sering kali dituangkan dalam bentuk program dan proyek;
3. Usulan tindakan bisa berasal dari individu atau kelompok baik dari dalam maupun luar pemerintah;
4. Penyediaan sumber daya untuk melaksanakan strategi. Sumber daya ini bisa berupa manusia maupun sumber daya lainnya.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Teori implementasi menurut George C. Edward III (dalam Riant Nugroho, 2009:31) menyatakan bahwa: Dalam perspektif ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang memiliki peranan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling terhubung satu sama lain.

Variabel Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat, dalam hal ini adalah cara pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut

disampaikan di dalam organisasi dan atau kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi pelaksana di lapangan.

Variabel Sumberdaya

Sumber daya merupakan elemen penting yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga profesional yang sesuai dengan kualifikasi yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif jika tidak ditangani oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang tugas yang relevan. Sumber daya memegang peranan vital dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif.

1. Staf
2. Informasi
3. Wewenang
4. Fasilitas

Variabel Disposisi (sikap pelaksana kebijakan)

Dalam pelaksanaan kebijakan, tidak boleh ada jurang pemisah antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Hubungan yang saling mendukung di antara keduanya sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar. Disposisi mencerminkan keinginan atau kesepakatan di antara para aktor untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi adalah:

1. Pengangkatan birokrat
2. Insentif

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi terkait dengan kecocokan organisasi birokrasi yang berfungsi sebagai penyelenggara pelaksanaan kebijakan publik. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mencegah terjadinya fragmentasi birokrasi, karena struktur ini dapat membuat proses pelaksanaan menjadi kurang efektif, meskipun variabel lain sudah terpenuhi dengan baik. Jika struktur birokrasi lemah, ini akan menghambat kebijakan yang kompleks yang memerlukan kolaborasi banyak pihak. Birokrasi, sebagai pelaksana kebijakan, harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan melakukan koordinasi yang efektif. Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu kebijakan; tanpa dukungan struktur birokrasi yang baik, pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal. Struktur birokrasi mencakup adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan kegiatan dari tahap pembuatan kebijakan hingga implementasi di lapangan.

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan umpan balik dari pelaksanaan rencana sebelumnya yang menjadi dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus ditingkatkan. Proses ini juga mencakup upaya untuk menciptakan integrasi dalam pemanfaatan berbagai sumber daya

pariwisata serta menggabungkan semua aspek yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan keberlangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996:99).

Objek dan Daya Tarik Wisata

Menurut Edward (1991), sebuah objek wisata harus memiliki lima unsur penting, yaitu:

1. Daya Tarik
2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata terdiri dari:

1. Akomodasi
2. Sarana Wisata
3. Infrastruktur
4. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya
5. Lingkungan
6. Budaya

OBJEK PENELITIAN

Sejarah PDAU

PDAU Darma Putra Kertaraharja adalah Badan Usaha Daerah Kuningan yang didirikan dengan dasar Peraturan Daerah Kuningan No. 8 Tahun 2009. Operasional PDAU dimulai pada tanggal 22 Maret 2010, yang ditandai dengan pelantikan Dewan Direksi oleh Bupati Kuningan.

Visi PDAU

Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya guna memajukan potensi usaha yang ada, maka visi dari Badan Usaha Daerah Kuningan dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi Perusahaan Daerah yang Mandiri, Profesional, Inovatif, dan Kompetitif Tinggi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kuningan.”

Visi ini menjelaskan bahwa Badan Usaha Daerah Kuningan berupaya meningkatkan kapabilitasnya sebagai salah satu sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah Kuningan.

Dengan melibatkan setiap elemen organisasi, visi ini berguna untuk:

1. Menetapkan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai
2. Memastikan tujuan dasar dari perusahaan
3. Menghubungkan kondisi saat ini dengan masa depan
4. Meningkatkan kekuatan organisasi
5. Memberikan motivasi
6. Menjadi pedoman perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya
7. Menyemangati
8. Mewujudkan fokus, arah, dan bimbingan yang fleksibel
9. Sebagai alat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Misi PDAU

1. Mengoptimalkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuningan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Memaksimalkan seluruh potensi sumber daya alam dan buatan dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan perusahaan.
3. Meningkatkan kolaborasi sinergis dengan pemerintah daerah, pusat, kementerian, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan pihak lain dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan perusahaan.
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki produktivitas, kualitas, dan efisiensi.

5. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan pendapatan Perusahaan.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi di atas sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi yang ada, diperlukan pengembangan nilai-nilai dalam organisasi Badan Usaha Daerah Kuningan, antara lain:

1. Etika kerja
2. Kejujuran
3. Keterbukaan
4. Efisiensi dan efektivitas
5. Pelayanan terbaik
6. Akuntabilitas
7. Profesionalisme.

Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan semua aparatur di Badan Usaha Daerah Kuningan dapat melaksanakan tugasnya dan mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi PDAU

1. Direktur
2. Satuan Pengawasan Internal
3. Kepala Divisi (Bisnis dan Operasional, Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Administrasi Keuangan dan SDM)
4. Kepala Bagian (Pemasaran dan Kerjasama, Proyek dan Pengembangan Usaha, Administrasi Umum dan Keuangan, SDM dan Legal)
5. Kepala Bagian (Pariwisata, MICE, Konsumer)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Oleh Badan Usaha Daerah (PDAU) Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma

Dalam pelaksanaan kebijakan oleh Badan Usaha Daerah (PDAU) Kabupaten Kuningan mengenai pengelolaan Objek

REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

Wisata Waduk Darma, kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adam Firdaus, Kepala Sub Bagian Divisi Bisnis dan Operasional Pariwisata di Badan Usaha Daerah (PDAU) Kabupaten Kuningan, mengatakan bahwa:

Tujuan dari kebijakan atau Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata adalah untuk menjadi acuan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Selain itu, kebijakan ini juga memperhatikan aspek budaya dalam pengembangan pariwisata. (Selasa, 05 Mei 2020)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kebijakan ini adalah sebagai pedoman untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Isi dari kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Cirebon dalam Pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma

Komunikasi

Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan melakukan sosialisasi terkait Objek Wisata Waduk Darma dengan cara meningkatkan interaksi antar organisasi. Komunikasi yang berjalan dengan baik dapat memperlancar proses penerapan kebijakan. Oleh karena itu, para pelaksana perlu menjalin koordinasi yang kuat dengan semua pihak

yang terlibat. Ini akan mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan. Interaksi antar organisasi dan aktivitas pelaksana memiliki beberapa aspek penting seperti pengawasan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi terkait.

Transmisi

Hal ini merujuk pada penyampaian komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan instruksi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Jika terdapat konflik, hal ini dapat menyebabkan gangguan dan kesalahan dalam komunikasi kebijakan, seperti salah tafsir yang muncul akibat banyaknya lapisan birokrasi yang harus dilalui selama proses komunikasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Rifki Arfan, Kepala Unit Wisata 1 Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk Objek Wisata Waduk Darma, menunjukkan bahwa:

“Sistem pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma berasal langsung dari Peraturan Daerah (Bupati). Saat ini, terdapat peraturan yang melarang Dinas Pariwisata mengelola objek wisata, sehingga perlu melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan membentuk Perusahaan Daerah, dan pendapatan dari objek wisata tersebut tetap disalurkan ke Pemerintah Daerah. Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada salah komunikasi mengenai pengelolaan Waduk Darma, karena kebijakan yang diterapkan berasal langsung dari Bupati, dan Perusahaan Daerah hanya melaksanakannya. Namun, untuk kebijakan di lapangan akan sangat bergantung pada pimpinan unit masing-masing. Dalam hal Waduk Darma, proses pengelolaannya di lapangan tergantung pada keputusan REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

pimpinan unit, karena PDAU tidak hanya bertanggung jawab pada Waduk Darma, tetapi juga mengelola sembilan objek wisata lain di Kabupaten Kuningan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020, di Waduk Darma)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa transmisi terkait kebijakan pengelolaan Waduk Darma antara Pemerintah Daerah (Bupati) dan Perusahaan Daerah (PDAU) berjalan dengan baik, tanpa adanya salah komunikasi.

Kejelasan dan Konsistensi

Bapak Rifki Arfan, Kepala Unit Wisata 1 Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk Objek Wisata Waduk Darma, juga menambahkan bahwa:

“Kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma sudah diterima dengan baik oleh PDAU, karena sifat kebijakan tersebut yang umum dan universal. Namun, ada beberapa kendala dalam kebijakan yang dibuat oleh Kepala Unit Wisata untuk dilaksanakan di lapangan, yang dialami oleh beberapa karyawan pengelola Waduk Darma. Hal ini disebabkan banyaknya keterlibatan warga setempat yang telah direkrut menjadi karyawan dalam pengelolaan Waduk Darma.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020, di Waduk Darma)

Dalam mengelola komunikasi yang baik, sangat penting untuk membangun dan mengembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik saluran komunikasi yang dikembangkan, semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut disampaikan dengan tepat.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), ketersediaan sumber daya adalah hal yang krusial untuk pelaksanaan kebijakan yang baik. Untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh sumber daya dalam penerapan kebijakan, terdapat beberapa indikator yang digunakan, yaitu:

Staf

Staf dalam penelitian ini merujuk kepada pegawai dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata Waduk Darma. Hal ini juga dijelaskan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Adam Firdaus, A. Md. , selaku Kepala Staf di Divisi Bisnis dan Operasional Pariwisata.

“Pengelolaan kebijakan untuk objek wisata Waduk Darma oleh staf kami cukup memadai, meskipun jumlah staf yang terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut masih terasa kurang. Ini disebabkan karena anggaran untuk staf PDAU bukan berasal dari Pemerintah daerah, tapi dari pendapatan objek wisata itu sendiri, dan saat ini pendapatan dari objek wisata sangat menurun drastis akibat adanya wabah covid-19. Namun, semua staf yang ada saat ini sudah menguasai bidang masing-masing, sehingga cukup membantu dalam pengelolaan objek wisata tersebut. ”

(Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 5 Mei 2020. Di Kantor PDAU)

Hasil wawancara ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa masalah pengembangan teknologi informasi hanya dipahami oleh satu orang saja. Sementara itu, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi dalam dunia pariwisata sangatlah vital untuk kemajuan promosi dan REFORMASI Vol 3 No 2 April 2019

pemasaran objek wisata, khususnya Waduk Darma.

Fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan Rifki Arfan selaku Kepala Unit Objek Wisata Waduk Darma, ia menyatakan:

“Pada umumnya, fasilitas di Waduk Darma sebagai lokasi wisata sudah cukup memadai. Mulai dari infrastruktur parkir hingga sarana lainnya juga sudah cukup memuaskan. ”

(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 15 Juni 2020. Di Waduk Darma)

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun fasilitas di objek wisata Waduk Darma sudah memenuhi kriteria, ada beberapa aspek prasarana yang masih kurang memuaskan bagi pengunjung, seperti toilet yang tidak gratis dan dikenakan biaya. Hal ini karena sebagian besar toilet di area Waduk Darma dimiliki oleh warga lokal yang juga membuka kantin/warung bersamaan dengan toilet. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, karena mereka harus membayar lagi jika ingin menggunakan toilet padahal sudah mengeluarkan uang untuk tiket masuk ke objek wisata.

Disposisi

Berdasarkan Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) menyatakan bahwa "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang efektif. "

1. Pengangkatan birokrat
2. Insentif

Struktur Birokrasi

Proses yang terdapat dalam birokrasi harus dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien tanpa bertentangan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Struktur birokrasi terdiri dari dua aspek, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan distribusi tanggung jawab. Dalam menerapkan kebijakan pengembangan tempat wisata Waduk Darma, tidak terdapat SOP khusus yang mengatur, melainkan hanya berdasarkan Tugas dan Fungsi Utama.

Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Cirebon dalam Pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma

Strategi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah yang mengelola Objek Wisata Waduk Darma adalah menambah jumlah staf atau karyawan, terutama di bidang pariwisata dan teknologi.

1. Menerapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pariwisata agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan objek wisata, khususnya Waduk Darma, bisa lebih optimal.
2. Melakukan pembangunan objek wisata Waduk Darma yang dikerjakan secara langsung oleh pihak provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap krusial dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena sangat berhubungan dengan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan terkait pengelolaan objek wisata Waduk

Darma, kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan.

2. Sementara itu, beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan objek wisata Waduk Darma oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan adalah:
 - a. Komunikasi yang belum berjalan optimal, terutama dalam sosialisasi dan promosi mengenai Objek Wisata Waduk Darma.
 - b. Kurangnya pengelolaan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha terhadap Objek Wisata Waduk Darma.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan promosi tentang objek wisata Waduk Darma melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook, agar pengunjung tertarik untuk berwisata ke Waduk Darma.
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata Waduk Darma, sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dapat memperoleh dukungan lebih dari pemerintah.

Saran

1. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar objek wisata serta lebih aktif dalam mempromosikan

objek wisata Waduk Darma melalui media sosial.

2. Pendapat yang diperoleh dari objek wisata sebaiknya diberikan perhatian lebih agar bisa digunakan kembali untuk keperluan fasilitas objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agus Erwan, Ratih Dyah. (2012). *Implementasi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit : Gava Media
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara Sahya. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*: Bandung. Penerbit : CV Pustaka Setia.
- Budi Winarno, (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Fandeli, Chafid. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Gumilar. (2008). *10 Menit Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Ciamis: Yayasan Gahara.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional* (Edisi Keempat). (2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mustofa, Bisri (2009). *Pedoman Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Gramedia Jakarta
- Suwantoro, Gamal. 2005. *Dasar-dasar Pariwisata*, yogyakarta : Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwitri Sri, 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik* . Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009, didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja

Journal:

- Abdulhaji, S., & Yusuf, I. S. H. (2017). *Pengaruh atraksi, aksesibilitas dan fasilitas terhadap citra objek wisata Danau Tolire Besar di Kota Ternate*. Humano: Jurnal Penelitian, 7(2), 134-148.

Agustina, R. (2014). *Analisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/580/jbptunikompp-gdl-valentinoh-28963-8-08-bab2.pdf> (di akses pada 12/03/2020. 20:00)
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00452-mn%20bab%202.pdf> (di akses pada 12/03/2020. 18:35)
https://www.academia.edu/38627449/BUKU_PEDOMAN_PENULISAN_SKRIPSI (di akses pada 24/05/2020. 21:19)

Sumber Lain-lain :